

PERAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KREDIT PERUMAHAN KRAMA DESA KEDONGANAN

I Kadek Yovie Virgan¹⁾, Komang Adi Sastra Wijaya²⁾, Ni Putu Anik Prabawati³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : virganyovie27@gmail.com, adisastrawijaya@fisip.unud.ac.id, prabawati@unud.ac.id.

ABSTRACT

(KRURA) is able to make the community more prosperous. However, as time goes by and the business activities of the Kedonganan Traditional Village LPD grow, the trust of the local customs and customers continues to grow. Kedonganan who wants to have his own house. Then the Krama Housing Credit (Krura) program was launched by the Kedonganan Traditional Village LPD. In addition, this Krura also aims to save or Bali's palemahan from foreign investor and outsiders. The three concepts will lead to three goals, namely trust, integrity and professionalism. With strong trust, LPD can be strong. Trust is a social capital for the Kedonganan Traditional Village LPD. The integrity of the LPD management and employees must be directed at the progress of the institution and the village, so that community integrity is expected to emerge towards the LPD. While professionalism is the key to the birth of trust and integrity.

Keywords: Lembaga Perkreditan Desa, Krama Kedonganan, Krura

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan LPD di desa adat sebagai memberdayakan perekonomian masyarakat adat Bali sangat tepat. Bagaimanapun, pembangunan ekonomi kerakyatan harus didukung dengan pendirian lembaga keuangan berskala mikro yang memberikan akses pemanfaatan dan pengelolaan Dana masyarakat, terutama yang tidak memiliki akses kepada bank-bank umum. Ekonomi kerakyatan memang memberi focus perhatian kepada kelompok masyarakat yang kurang berdaya karena akses keuangan mereka sangat terbatas.

Bali salah satu dengan adanya pembangunan Lembaga Perkreditan Desa yaitu agar menstabilkan perekonomian masyarakat nya itu sendiri, sehingga nantinya mengoptimalkan salah satu perekonomian yang ada di LPD Seluruh Bali. Dengan adanya LPD yang ada di seluruh Bali, maka itu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga nantinya memutus lingkaran kemiskinan di setiap Desa yang ada di Bali.

Berdirinya Lembaga Perkreditan Desa yaitu guna mencegah kemiskinan pada krama adat, sehingga nantinya akan membantu perekonomian masyarakat, ini adalah sebuah strategi guna untuk mengembangkan Lembaga Perkreditan

Desa setiap daerah yang ada Di Bali. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 menyatakan bahwa Sebuah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk mensuport program yang ada di pedesaan mengenai upaya menstabilkan perekonomian masyarakat di desa itu sendiri (PeraturanBPK.go.id).

Dengan membludaknya populasi yang ada di desa kedonganan, maka yang harus dibutuhkan yaitu rumah, makadari itu LPD Kedonganan merancang sebuah program KRURA yang dimana program ini dikhususkan bagi krama mipil desa Kedonganan sendiri. Salah satu LPD Kedonganan yang saat ini banyak dibicarakan karena viral dengan program unggulannya adalah Kredit Perumahan Krama (KRURA). Diketahui sejauh ini, program. Lembaga Perkreditan Desa Mengharapkan ke depan, produk (KRURA) ini mampu menjadikan masyarakat lebih sejahtera.

Program perumahan krama yang di buat oleh pihak organisasi LPD Kedonganan agar para krama mipil yang masih bertempat tinggal dengan orang tua agar bisa mendapatkan program tersebut, dikarenakan agar suatu saat tidak berdesakan dengan orang lainnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah dampak peran LPD Kedonganan dalam program pemberian KRURA dalam mensejahterakan

masyarakat Desa Kedonganan dan LPD Kedonganan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi dengan tujuan untuk Untuk menjelaskan bagaimana dampak peran peran LPD Kedonganan dalam program pemberian KRURA mensejahterakan masyarakat Desa Kedonganan dan LPD Kedonganan

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kinerja

Kinerja atau *performance* dalam konteks manajemen publik, merupakan kata kunci yang sangat populer dan menarik. Dalam mewujudkan tujuan, visi, serta misi suatu organisasi, Kinerja dapat diukur berdasarkan dua sisi yaitu kinerja perorangan atau individu (pegawai) serta kinerja yang diukur berdasarkan kelompok orang atau organisasi (Bastian, 2001 : 329).

Kinerja atau dengan nama lain *performace* memiliki definisi lain sebagai pencapaian dari sebuah hasil atau *degree of accomplishtment* (Rue dan Byars, 1981 dalam Keban 1995 : 74). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja dapat dilihat melalui sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang telah di rancang dan disetujui sebelumnya dalam suatu organisasi atau kelompok

Dalam mengukur kinerja suatu birokrasi atau organisasi, Dwiyanto dalam Ruky (2006 : 74) mengemukakan lima indikator (tolok ukur) pengukuran kinerja

a. Produktivitas, Secara filosofis produktivitas merupakan suatu pandangan atau dasar yang selalu

memiliki usaha dan berpedoman bahwa hari ini mutu kehidupan harus lebih baik dari kemarin, sedangkan besok harus lebih baik lagi dari hari ini. Produktivitas tidak saja mengukur seberapa efisien kinerja, tetapi juga mengukur efektivitas dari pelayanan kinerja tersebut. Produktivitas pada dasarnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output atau kesesuaian dengan visi dan misi yang dibawa suatu organisasi. Faktor penunjang produktivitas antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi penunjang.

b. Kualitas layanan, merupakan indikator yang cukup penting dalam pelaksanaan kinerja, maka kualitas layanan dapat menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah digunakan. Komponen Kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai indikator dalam melakukan penilaian atau pengukuran kinerja dari suatu organisasi publik. Disisi lain kualitas layanan dapat diukur dengan merujuk pada upaya organisasi tersebut dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dan mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

c. Responsivitas, merupakan kemampuan organisasi publik untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun rencana agenda dan prioritas pelayanan masyarakat, serta mengembangkan program layanan yang cocok dengan kebutuhan masyarakat serta aspirasi atau masukan dari masyarakat.

Responsivitas dapat ditunjukkan melalui keselarasan antara pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan dari masyarakat dalam pelaksanaan suatu kinerja organisasi. Responsivitas juga merujuk pada wujud kepekaan atau upaya organisasi merespon kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan atau kebijakan.

d. Responsibilitas, merupakan standar pengukuran kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan organisasi publik dengan prinsip dasar administrasi yang baik dan benar dengan kebijakan organisasi secara eksplisit maupun implisit. Dalam hal responsibilitas, suatu organisasi dapat melaksanakan kinerja yang optimal sesuai dengan tanggungjawab. Responsibilitas merujuk pada aspek rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan organisasi yang sesuai dengan aturan kewajiban dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu responsibilitas seringkali terbentur dengan responsivitas

e. Akuntabilitas, menunjuk seberapa besar kebijakan pelaksanaan kegiatan organisasi tunduk pada pemimpin yang dipilih oleh masyarakat. Hal ini memiliki asumsi ketika pemimpin dipilih oleh masyarakat dengan sendirinya harus memprioritaskan kepentingan khalayak umum. Dalam konteks ini, akuntabilitas publik dapat difungsikan guna mengukur seberapa besar kebijakan atau kinerja organisasi memiliki prinsip keterbukaan dan

transparansi kepada masyarakat dan khalayak umum.

Landasan

Konseptual Konsep

Program

Menurut Dye (1992) dengan konsep programnya yang dinyatakan yaitu, kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip. Hogwood dan Gunn (1986) mengutarakan pendapat disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Strategi pelaksanaan.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Anggaran Yang Memadai
4. Aturan-Aturan Yang Telah Dibuat
5. Tujuan Yang Akan Dicapai

Program Kredit Perumahan Krama

Dalam Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang diatur dalam Pasal 60 mengatur pengembangan usaha melalui Baga Praduen Desa Adat (Bupda). Dalam memajukan LPD diperlukannya kerjasama dan sinergi baik pembina Desa Adat, pengurus LPD maupun masyarakat adat. LPD Kedonganan dibangun untuk kepentingan krama adat bukan mempersulit anggota sendiri. Program ini ditujukan bagi warga masyarakat kedonganan dengan program krura yang dibuatkan Lembaga Perkreditan Desa. Sehingga dengan dibuatkannya program perumahan akan menjadi role model untuk semua LPD yang berada di bali, untuk mensejahterakan kramanya dengan program perumahan, pada saat itu LPD harus memfokuskan kepada Krama yang memang benar benar membutuhkan.

Dengan luas wilayah Kedonganan yang sangat terbatas, maka dari itu program KRURA ini mengambil alih tanah di Desa Ungasan dengan menempatkan Krura disana. Dan jenis type rumah yang ditawarkan LPD Kedonganan kepada krama yaitu jenis type 36, KRURA juga membiayai upacara upacara pemlaspas pecaruan Rsi Gana beserta biaya PDAM, PLN, Pelinggih, Sertifikat untuk Krama Desa Adat Kedonganan. KRURA ini pertama kali dicetuskan Desa Kedonganan. Semoga KRURA dari LPD Desa Adat Kedonganan menjadi role mode dan inspirasi seluruh LPD Desa Adat di Bali dalam menyejahterahkan Krama Desa Adatnya masing-masing. Peraturan Menteri Negara Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Bantuan dari pemerintah untuk memsubsidi Perumahan dimana fasilitas perumahan semua akan difasilitasi.

Sasaran dari program ini adalah krama khusus Kedonganan yang tidak memiliki rumah ataupun yang masih tinggal dirumah tuanya dengan perekonomian yang kurang. Penerimaan kredit perumahan ini harus merupakan krama adat Kedonganan. Teknis permohonan kredit perumahan krama ini yakni dengan dibantu oleh kelian setiap banjar untuk mencari KK untuk diseleksi dan yang kurang mampu dan rumahnya emang tidak layak di penghuni dengan administrasi terpenuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan

1. Produktivitas

Produktivitas LPD dari program kredit perumahan berupa sangat penting bagi

pengoptimalan sebuah kredit perumahan krama. Dimana agar rumah tersebut produktif bagi krama yang akan bertempat tinggal mendapatkannya.

Masyarakat Kedonganan sebelum melakukan pinjaman dan sesudah melakukan pinjaman dan hal ini juga mengartikan bahwa keberadaan program KRURA sangat mendukung dalam mendapatkan rumah yang apabila krama tersebut belum mempunyai rumah di daerah Kedonganan. LPD Kedonganan ini sebagai peningkatan produktivitas dapat diartikan sebagai peningkatan-peningkatan hasil yang dicapai dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien hingga dapat memberikan dampak kepada krama adat dan menumbuhkan ekonomi ke arah yang lebih baik. Program KRURA di Desa Kedonganan merupakan sasaran dari penyaluran Lembaga Perkreditan Desa memberikan peningkatan produktivitas kepada krama agar nantinya mempunyai rumah layak huni, dimana memang terdapat temuan yang berarti di lapangan.

2. Kualitas Layanan

kualitas layanan dapat diukur dengan merujuk pada upaya organisasi tersebut dalam meningkatkan kualitas layanan dan mencapai tujuan organisasi. Dalam hal kinerja LPD Kedonganan memiliki alur yang terstruktur dan sangat ketat. LPD menerapkan persyaratan administratif yang cukup banyak sebagai langkah awal dalam proses perizinan. Selain itu, dalam melaksanakan pelayanan perizinan, LPD Kedonganan Bekerjasama dengan kelian adat guna menseleksi krama krama yang

kurang mampu dan benar-benar belum memiliki tempat tinggal pribadi. Kelayakan Lokasi KRURA ini dipilih oleh LPD Kedonganan berada di Desa Adat Ungasan, dimana lokasi tersebut strategis berdekatan dengan Desa Kedonganan dan juga di Desa Ungasan terdapat beberapa tanah yang dimiliki LPD Kedonganan.

Penerpan layanan izin yang berkualitas di LPD Kedonganan ditunjukkan oleh adanya kebijakan Evaluasi Perizinan yang dilakukan LPD kepada setiap masyarakat.

Evaluasi tersebut dilakukan dengan melihat faktor kepatuhan terhadap peraturan, nilai transaksi, dan perlindungan konsumen. Dengan adanya evaluasi perizinan, LPD Kedonganan menjadi lebih selektif menentukan keputusan pemberian perizinan yang juga berpedoman pada Standard Operating Procedure yang telah dibuat Bank Indonesia berdasarkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat seperti perlindungan data nasabah, keterbukaan informasi serta pemahaman terkait kredit.

3. Responsivitas

LPD Kedonganan sendiri mewujudkan aspek responsivitas dengan membentuk kerjasama dengan pemerintah Desa Adat Kedonganan. Kerjasama ini dilakukan sebagai upaya merespon masyarakat penerima program disekitar kedonganan terkait upacara pecaaruan perumahan KRURA. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah desa adat Kedonganan juga masih mendapat kendala antara lain Pemerintah Desa Adat Kedonganan tidak

memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan mandiri sehingga kerjasama dengan LPD Kedonganan sangat terbatas.

Upaya mewujudkan pengaduan masyarakat yang responsif, LPD Kedonganan memiliki pengaduan masyarakat yang variatif dan jelas. Hal ini menjadi akses kemudahan masyarakat dalam melaporkan terjadinya kredit macet dalam program KRURA. Selain itu LPD Kedonganan memiliki alur pengaduan yang terstruktur dan terarah. Alur pengaduan tersebut dibuat dengan penyelesaian tingkat dasar terlebih dahulu, apabila tidak menghasilkan kesepakatan barulah pengaduan akan diproses bersama Debitur di kantor LPD. Berdasarkan berbagai uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek responsivitas sudah cukup optimal diterapkan pada kinerja LPD Kedonganan dalam melaksanakan program KRURA.

4. Responsibilitas

Upaya LPD Kedonganan mewujudkan kinerja yang optimal dan bertanggung jawab, dalam pelaksanaan program KRURA yaitu perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian awal atau perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak kreditur dengan pihak debitur dimana dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. penerapan akuntabilitas pada LPD Kedonganan terhadap penerapan program KRURA sudah cukup optimal. Hal ini ditunjukkan pada transparansi yang diterapkan LPD Kedonganan kepada masyarakat ataupun nasabah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih ditemui beberapa

kendala dalam penerapan prinsip akuntabilitas tersebut, yakni debitur pada sistem Badan pengawas yang tidak sesuai dengan dokumen program KRURA serta diseleksinya krama oleh kelian adat dan juga oleh pihak LPD. Penyampaian informasi tersebut merupakan salah satu penerapan prinsip transparansi dalam melayani debitur yang mendapatkan KRURA.

5. Akuntabilitas

akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan atau kinerja organisasi konsisten dengan kehendak publik.

Akuntabilitas LPD dimana terdapat anggaran dana desa untuk membuat suatu infrastruktur dengan pembuatan perumahan krama untuk masyarakat kedonganan dimana peran LPD terhadap kinerja LPD dengan akuntabilitas begitu terjadinya kinerja yang optimal.

Adanya suatu akuntabilitas terhadap kinerja LPD sangat membantu untuk efektivitas, efisiensi terhadap kejujuran pegawai kepada masyarakat Kedonganan, sehingga masyarakat Kedonganan tidak perlu khawatir lagi dalam pelayanan dari organisasi LPD itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dalam penelitian terkait Kinerja Bank Indonesia dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan penukaran valuta asing bukan bank di Kabupaten Badung, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja Bank Indonesia dalam

melaksanakan pengawasan pada kegiatan usaha transaksi jual beli valuta asing bukan bank sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari beberapa indikator ukuran kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Dwiyanto yang merujuk pada indikator produktivitas kinerja, kualitas layanan, responsivitas dan tanggungjawab, serta akuntabilitas kinerja.

Namun, dalam pelaksanaan kinerja suatu organisasi publik tentu saja terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam mewujudkan kinerja yang optimal. Hambatan tersebut antara lain minimnya sosialisasi berbasis partisipasi aktif yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat serta minimnya pengawasan secara langsung (*onsite*) baik berupa sidak ataupun penertiban usaha *Money Changer*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Dendawijaya, Lukman, 2001. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, 1986, *Policy Analysis for the Real*
- Husein, Umar. 1998. *Riset Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro. 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2014. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Thoha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Tje'Aman, Edy Putra. 1989, *Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Liberty World, Oxford University Press.

JURNAL :

- Anggraini Ayu Ida. 2011. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Tapak (Studi Kasus Pada Loan Service di PT Bank Tabungan Negara, TBK Kantor Cabang Pembantu Sukoharjo)
- Atmawati. 2015. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Matahari Departement Store Di Solo Grand Mall. (Di Akses pada 18 Januari 2021)
- Ida Ayu Dewi Ratna Sari. 2018. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit Pada LPD Di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung.
- Julian Julpa Sari. 2013. Prosedur Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Kepada Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Panam.
- Ningsih Pera Sundaria. 2014. Evaluasi pengelolaan kinerja sosial ekonomi Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
- Supriyanto. 2006. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan.
- Tan, S., & Anggraeni, L. (2017). The effect of financial performance on state-owned banks credit in Indonesia.